



PUTUSAN
Nomor 1942/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Dedy Damhadi, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya Pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-817/PJ./2014 tanggal 26 Maret 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

BUT KODECO ENERGY Co., Ltd., NPWP: 01.002.404.0-053.000, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I Lantai 24, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 52, Jakarta 12190;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49313/PP/M.III/12/2013, Tanggal 12 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2004 Nomor: 00012/203/04/053/09 tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2009 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP-515/WPJ.07/KP.0700/2009 tanggal 17 November 2009, dengan perhitungan sebagai berikut:

| | | |
|-------------------------------------|----|-------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak | Rp | 47.050.564.302,00 |
| PPH Pasal 23 yang terutang | Rp | 1.422.264.891,00 |
| Kredit Pajak | Rp | 854.110.097,00 |
| Pajak yang tidak/kurang dibayar | Rp | 568.154.794,00 |
| Sanksi Administrasi: | | |
| Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP | Rp | 272.714.301,00 |
| Jumlah PPh yang masih harus dibayar | Rp | 840.869.095,00 |

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 *a quo* Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 064/KDCE/FIN/II-10 tanggal 16 Februari 2010 yang diterima Terbanding pada tanggal 16 Februari 2010 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1268/WPJ.07/2010 tanggal 15 November 2010 permohonan Pemohon Banding tersebut ditolak, sehingga dengan Surat Nomor: KDCE/VPFIN.043/II.2011 tanggal 10 Februari 2011 mengajukan banding;

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: KDCE/VPFIN.043/II.2011 tanggal 10 Februari 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1268/WPJ.07/2010 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2004, yang lebih lanjut Pemohon Banding uraikan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor: 00012/203/04/053/09 Masa Pajak September 2004 tertanggal 18 November 2009, dimana di dalamnya menyatakan:

| | |
|--|---------------------------|
| - Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak | Rp.47.050.564.302,00 |
| - PPh Pasal 23 yang terutang | Rp. 1.422.264.891,00 |
| - Kredit Pajak | <u>Rp. 854.110.097,00</u> |
| - Pajak yang kurang dibayar | Rp. 568.154.794,00 |
| - Sanksi Administrasi | <u>Rp. 272.714.301,00</u> |
| - Jumlah PPh yang masih harus dibayar | Rp. 840.869.095,00 |

Bahwa jumlah tersebut dikarenakan pada waktu pemeriksaan pajak dilakukan koreksi-koreksi sebesar Rp.5.079.129.207,00 yang meliputi:

- Koreksi atas transaksi *reimbursement* sebesar Rp.901.157.934,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Koreksi atas transaksi jasa pelayaran luar negeri sebesar Rp.2.556.922.071,00;
- c. Koreksi atas transaksi jasa konstruksi sebesar Rp.1.134.082.608,00;
- d. Koreksi atas transaksi dengan CV. Duta Harapan sebesar Rp.40.400.000,00;
- e. Koreksi atas transaksi jasa konsultan sebesar Rp.349.202.687,00;
- f. Koreksi atas transaksi-transaksi yang telah dibalik/reverse sebesar Rp.97.363.906,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak bisa menerima koreksi-koreksi tersebut, oleh karena itu melalui Surat Pemohon Banding Nomor: 064/KDCE/FIN/II-10 tanggal 16 Februari 2010 Pemohon Banding telah mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor: 00012/203/04/053/09 Masa Pajak September 2004 tersebut di atas;

Bahwa melalui Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1268/WPJ.07/2010 tanggal 15 November 2010 yang baru Pemohon Banding terima tanggal 18 November 2010, pihak Terbanding telah menolak keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor: 00012/203/04/053/09 Masa Pajak September 2004;

Bahwa Pemohon Banding tidak bisa menyetujui/menerima Keputusan Terbanding tersebut di atas, oleh karena itu bersama ini Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1268/WPJ.07/2010 tanggal 15 November 2010 tersebut di atas dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Koreksi atas transaksi *reimbursement* sebesar Rp.901.157.934,00:
 1. Koreksi atas transaksi dengan CNOOC sebesar Rp.898.225.134,00, yang menurut Terbanding terdiri dari:
 - Jasa konsultan sebesar Rp.885.711.939,00
 - Jasa pembersihan sebesar Rp.450.000,00
 - Jasa teknik sebesar Rp.5.489.230,00
 - Sewa aktiva sebesar Rp.102.500,00
 - Jasa penyedia tenaga kerja sebesar Rp.2.941.575,00
 - Jasa manajemen sebesar Rp.3.529.890,00
 2. Koreksi atas transaksi *reimbursement* dengan CV Safari Megah sebesar Rp.2.932.800,00 yang menurut Terbanding merupakan transaksi sewa kendaraan.

Bahwa seluruh transaksi tersebut di atas adalah transaksi *reimbursement*. Menurut Pemohon Banding, imbalan atas transaksi



tersebut bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, karena transaksi tersebut adalah transaksi *reimbursement* murni, dimana tidak ada tambahan keuntungan dalam penagihannya kepada Pemohon Banding. Dalam penagihannya, pihak vendor melampirkan bukti-bukti pendukung seperti *invoice*. Selain itu vendor tersebut juga tidak menagihkan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi ini kepada Pemohon Banding;

Bahwa hal ini sesuai dengan S-1132/PJ.52/1989 yang menetapkan bahwa apabila terdapat bagian biaya yang dapat diganti (*reimbursable*) yang di dalamnya termasuk Pajak Pertambahan Nilai walaupun telah dibayar terlebih dahulu oleh yang menyewakan atau penjual, maka atas bagian biaya yang *reimbursable* itu tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan surat tersebut, maka apabila biaya *reimbursable* tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka sudah dapat dipastikan bahwa transaksi tersebut juga tidak terutang Pajak Penghasilan 23;

Bahwa di dalam KEP-170 Tahun 2002 juga dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan 23 hanya dipotong atas jasanya saja, bila di dalam kontrak dan tagihan dapat dipisahkan antara material dan jasa. Kontrak Pemohon Banding dengan vendor tersebut memisahkan antara material/gaji dan jasanya, dimana dalam kasus ini tidak ada jasa yang ditagihkan oleh kedua vendor tersebut;

Bahwa selain itu di dalam SE-53/PJ/2009 juga ditegaskan bahwa *reimbursement cost* bukan merupakan objek Pajak Penghasilan selama dapat didukung oleh bukti-bukti pendukung seperti faktur tagihan, kontrak kerja atau pembayaran gaji;

b. Koreksi atas transaksi jasa pelayaran luar negeri sebesar Rp.2.556.922.071,00, yaitu:

1. Koreksi atas transaksi dengan PT Citra Maritimindo sebesar Rp.280.427.550,00
2. Koreksi atas transaksi dengan PT Samudra Petrindo sebesar Rp.2.276.494.521,00

Bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi ini seharusnya bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, tetapi terutang Pajak Penghasilan Pasal 15 atas transaksi pelayaran luar negeri dengan tarif 2,64% sesuai dengan SE-32/PJ.4/1996 mengenai jasa pelayaran dikarenakan jasa yang diberikan oleh kapal FSO (*Floating Storage Offshore*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan bagian dari proses pengangkutan minyak mentah dari sumur-sumur di dalam daerah WKP (Wilayah Kerja Penambangan) kepada pembeli melalui kapal-kapal tanker. Disamping itu, menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2005 pada Pasal 1 bahwa definisi kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik atau alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah sehingga kapal FSO termasuk dalam definisi kapal tersebut. Oleh karena itu, Pemohon Banding tetap berpendapat bahwa transaksi tersebut merupakan Objek Pajak Penghasilan 15 atas transaksi luar negeri yang di kenakan tarif 2,64%;

- c. Koreksi atas transaksi sebesar Rp.1.134.082.608,00 yang merupakan transaksi jasa konstruksi

Bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi tersebut adalah merupakan transaksi atas jasa konstruksi yang merupakan Objek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 2%. Pemohon Banding telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi tersebut. Di samping itu, tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan tarif Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) adalah sama, yaitu 2%;

- d. Koreksi atas transaksi dengan CV Duta Harapan sebesar Rp.40.400.000,00 yang merupakan transaksi jasa angkutan darat

Bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi ini seharusnya bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, karena jasa yang diberikan Duta Harapan adalah jasa angkutan kendaraan perusahaan angkutan barang yang mengangkut dari tempat pengiriman ke tempat tujuan berdasarkan kontrak/perjanjian angkutan yang dibayar berdasarkan banyak atau volume barang, berat barang, jarak ke tempat tujuan sepanjang kontrak/perjanjian tersebut semata-mata demi terjaminnya barang yang diangkut tersebut sampai di tempat tujuan pada waktunya. Hal ini sesuai dengan SE-08/PJ.313/1995 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Persewaan Alat Angkutan Darat;

- e. Koreksi atas transaksi pembayaran kepada SSEK sebesar Rp.349.202.687,00

Bahwa menurut Pemohon Banding, jumlah tersebut merupakan transaksi piutang intercompany dari Pemohon Banding kepada BUT Korea Development Co., Ltd. atas jasa konsultan hukum yang diterima BUT Korea Development Co., Ltd. dari SSEK, sehingga menurut Pemohon Banding, Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa tersebut tidak terhutang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding tetapi pada BUT Korea Development Co., Ltd. karena pihak yang menerima jasa tersebut;

f. Koreksi atas transaksi-transaksi yang telah dibalik/reverse sebesar Rp.97.363.906,00, yang terdiri dari:

1. Transaksi accrual sebesar Rp.5.273.684.894,00 untuk jasa konsultan dicatat pada dokumen Nomor: 200000876 pada tanggal 28 September 2004. Pemohon Banding telah melakukan pembalikan atas catatan transaksi tersebut pada dokumen Nomor: 200000885 pada tanggal 28 September 2004;
2. Transaksi *sharing cost* atas sewa kendaraan antar KPS yang ditagihkan oleh Conoco Indonesia sebesar Rp.7.213.906,00. Transaksi di atas telah dicatat pada dokumen Nomor: 1900028007 pada tanggal 8 September 2004. Pemohon Banding telah melakukan pembalikan atas catatan transaksi tersebut pada dokumen Nomor: 1700001404 pada tanggal 8 September 2004;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Pemohon Banding transaksi sebesar Rp.1.388.124.528,00 adalah bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, dan atas transaksi sebesar Rp.1.134.082.608,00 adalah Objek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) yang sudah Pemohon Banding potong dengan tarif 2%, sedangkan atas transaksi sebesar Rp.2.556.922.071,00 adalah Objek Pajak Penghasilan Pasal 15 dengan tarif 2,64% yang merupakan jasa pelayaran luar negeri, sehingga Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor: 00012/203/04/053/09 Masa Pajak September 2004 tertanggal 18 November 2009 semestinya di dalamnya menyatakan:

| Uraian | Menurut Pemohon Banding (Rp.) |
|--|-------------------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak | 41.971.435.096,00 |
| PPH Pasal 23 Yang Terhutang | 1.108.629.173,00 |
| Kredit Pajak | (854.110.097,00) |
| Pajak Yang Kurang (Lebih) Dibayar | 254.519.076,00 |
| Sanksi Administrasi | 122.169.156,00 |
| PPH Pasal 23 Yang Kurang (Lebih Dibayar) | 376.688.232,00 |

Bahwa perlu Pemohon Banding tambahkan, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 36 (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2004 tersebut diatas, Pemohon Banding telah melakukan pembayaran sebesar Rp.840.869.095,00 dengan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahbukuan atas pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2009 Nomor: PBK-00959/XII/WPJ.07/KP.0703/2009;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49313/PP/M.III/12/2013, Tanggal 12 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1268/WPJ.07/2010 tanggal 15 November 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2004 Nomor: 00012/203/04/053/09 tanggal 18 November 2009, atas nama: BUT Kodeco Energy Co., Ltd., NPWP: 01.002.404.0-053.000, beralamat di: Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I Lt.24 Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52, Jakarta Selatan 12190, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2004 harus dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

| | |
|---|---------------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak | Rp.46.109.006.368,00 |
| Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang | Rp. 1.353.805.970,00 |
| Kredit Pajak | <u>Rp. 854.110.097,00</u> |
| PPH Pasal 23 yang kurang dibayar | Rp. 499.695.873,00 |
| Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP | <u>Rp. 239.854.019,00</u> |
| Jumlah yang masih harus dibayar | Rp. 739.549.892,00 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49313/PP/M.III/12/2013, Tanggal 12 Desember 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-817/PJ./2014 tanggal 26 Maret 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 1 April 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 April 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Peninjauan Kembali Nomor: TKM-76/PAN.Wk/2016, tanggal 12 Februari 2016;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali
Tentang sengketa atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 23 Masa Pajak September 2004 sebesar Rp901.157.934,00 atas *reimbursement* yang terdiri dari:
 - A. Koreksi *Reimbursement* dengan CNOOC sebesar Rp898.225.134,00
 - B. Koreksi Transaksi dengan Safari Megah sebesar Rp2.932.800,00yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- II. Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali
 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), antara lain menyatakan sebagai berikut:
Pasal 76:
Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuksahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).
Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:
Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.
Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.
Pasal 78:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (1) huruf c:

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan :

- c. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas :

- 1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (3):

Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang



yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan KEP-170), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1:

- (1) Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya.
- (2) Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang, akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.

Pasal 2:

Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah:

- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996;
- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk



usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pasal 3:

Perkiraan Penghasilan Neto atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4:

Jenis jasa lain dan Perkiraan Penghasilan Neto atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Bahwa pokok pembahasan masing-masing sengketa adalah sebagai berikut:

A. Atas Koreksi *Reimbursement* dengan CNOOC sebesar Rp898.225.134,00

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum/ kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Putusan *a quo*, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 22 alinea pertama:

Bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 23 berupa transaksi reimbursement dengan CNOOC sebesar Rp.898.225.134,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas objek PPh Pasal 23 berupa transaksi *reimbursement* dengan CNOOC sebesar Rp898.225.134,00.
3. Bahwa pokok sengketa *a quo* adalah merupakan sengketa yuridis dan pembuktian apakah pembayaran *reimbursement* dengan CNOOC sebesar Rp898.225.134 merupakan objek PPh Pasal 23 ataukah tidak.



4. Bahwa koreksi *reimbursement* dengan CNOOC sebesar Rp898.225.134 terdiri dari:

| | | |
|------------------------------|----|----------------|
| - Jasa konsultan | Rp | 885.711.939,00 |
| - Jasa pembersihan | Rp | 450.000,00 |
| - Jasa Teknik | Rp | 5.489.230,00 |
| - Sewa aktiva | Rp | 102.500,00 |
| - Jasa penyedia tenaga kerja | Rp | 2.941.575,00 |
| - Jasa manajemen | Rp | 3.529.890,00 |
| Jumlah | Rp | 898.225.134,00 |

5. Bahwa berdasarkan hasil uji bukti diketahui hal-hal sebagai berikut:

5.1. Bahwa berdasarkan data-data/dokumen-dokumen terkait dengan transaksi dengan CNOOC yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan transaksi *reimbursement* sebesar Rp898.225.134,00, berdasarkan data/bukti/dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa Invoice yang ditagihkan pihak vendor sehubungan dengan jasa yang dimanfaatkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah dari vendor kepada CNOOC (bukan langsung kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)).

5.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membayar jasa yang dimanfaatkan berdasarkan tagihan dari CNOOC kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1047/PJ.322/2004 antara lain menegaskan Dalam hal penggantian terdapat suatu jumlah yang ditagih oleh Pengusaha jasa yang berasal dari tagihan pihak ketiga yang dokumennya langsung atas nama penerima jasa, maka jumlah tersebut tidak merupakan penggantian yang jadi dasar pengenaan pajak, karena dianggap sebagai *reimbursement*.

6. Bahwa berdasarkan hasil uji bukti, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

6.1. Bahwa transaksi antara CNOOC dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan merupakan transaksi *reimbursement* karena berdasarkan invoice dari pihak ketiga (vendor) ditujukan kepada CNOOC dan bukan langsung kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai penerima jasa.



- 6.2. Bahwa tagihan dari CNOOC kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan penggantian yang menjadi DPP dan merupakan penyerahan jasa dari CNOOC kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
- 6.3. Bahwa atas jasa yang diserahkan oleh CNOOC merupakan Objek PPh Pasal 23, yang dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 terutang.
7. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan pada intinya transaksi yang dikoreksi merupakan transaksi *reimbursement* atas tagihan sewa kantor dari CNOOC.
8. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), biaya yang dibayarkan kepada CNOOC merupakan penggantian yang terutang PPh Pasal 23.
9. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa atas penggantian tersebut telah dipotong PPh Pasal 23, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi.
10. Bahwa Koreksi *Reimbursement* dengan CNOOC sebesar Rp898.225.134,00 terdiri dari:

| | | |
|------------------------------|----|----------------|
| - Jasa konsultan | Rp | 885.711.939,00 |
| - Jasa pembersihan | Rp | 450.000,00 |
| - Jasa Teknik | Rp | 5.489.230,00 |
| - Sewa aktif a | Rp | 102.500,00 |
| - Jasa penyedia tenaga kerja | Rp | 2.941.575,00 |
| - Jasa manajemen | Rp | 3.529.890,00 |
| Jumlah | Rp | 898.225.134,00 |

11. Bahwa sesuai dengan KEP-170, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp898.225.134,00 nyata-nyata terkait dengan pembayaran jasa yang terutang PPh Pasal 23.
12. Bahwa sampai dengan persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa atas Objek PPh Pasal 23 tersebut di atas, telah dipotong PPh Pasal 23.
13. Bahwa pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyanggah koreksi yang dilakukan Pemohon



Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan menyatakan bahwa transaksi yang dikoreksi tersebut merupakan *reimbursement* atas tagihan yang telah dibayarkan lebih dahulu oleh CNOOC tidak dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang mendukung sanggahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

14. Bahwa Majelis berpendapat sebagaimana tertuang pada halaman 21-22 Putusan *a quo* menyatakan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan Majelis berpendapat, atas transaksi sebesar Rp.898.225.134,00 tersebut nyata-nyata merupakan reimbursement yang terkait dengan biaya yang terlebih dahulu dibayarkan oleh CNOOC sebagai salah satu participant dalam Production Sharing Contract West Madura Offshore dan Pemohon Banding bertindak sebagai operatornya;

bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 23 berupa transaksi reimbursement dengan CNOOC sebesar Rp.898.225.134,00 tidak dapat dipertahankan.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dan tidak setuju dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut dengan alasan sebagai berikut :

14. 1. Bahwa berdasarkan data dan fakta sampai dengan proses persidangan, bukti-bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa:

- Invoice dari Vendor ke CNOOC
- Invoice dari CNOOC ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)
- Bukti pembayaran dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke CNOOC

Bahwa bukti tersebut menunjukkan adanya tagihan dari CNOOC kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas penyerahan jasa dari CNOOC kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang terutang PPh Pasal 23 sesuai dengan KEP-170.

14. 2. Bahwa faktanya, atas pembayaran *Invoice* yang diterbitkan oleh CNOOC merupakan biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding) yang dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Maka sesuai dengan prinsip umum *deductible-taxable*, apabila suatu biaya telah dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 UU PPh, biaya itu merupakan objek pajak bagi pihak penerima penghasilan, dalam hal ini adalah objek PPh Pasal 23.

14.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bahwa atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemanfaatan jasa dari CNOOC tersebut telah dipotong PPh Pasal 23.

14.4. Bahwa dalam proses pengambilan keputusan di persidangan, Majelis harus memperhatikan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

14.5. Bahwa menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak mengamatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menentukan beban pembuktian, melakukan penilaian pembuktian dan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan.

14.6. Bahwa faktanya, dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis tidak cermat dalam melihat bukti-bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di persidangan.

15. Bahwa penjelasan terkait bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:

15.1. *Invoice* dari Vendor ke CNOOC

Bahwa bukti tersebut tidak terkait transaksi dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena bukti invoice tersebut merupakan tagihan dari pihak ketiga (vendor) yang ditujukan kepada CNOOC sebagai penerima jasa, dan bukan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

15.2. *Invoice* dari CNOOC ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Bukti Pembayaran dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke CNOOC.



Bahwa bukti tersebut terkait dengan transaksi antara CNOOC dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan penerima jasa dan CNOOC merupakan pemberi jasa.

Bahwa atas jasa yang telah diterimanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pembayaran kepada CNOOC yang merupakan biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Maka sesuai dengan prinsip umum *deductible-taxable*, apabila suatu biaya telah dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 UU PPh, biaya itu merupakan objek pajak bagi pihak penerima penghasilan, dalam hal ini adalah objek PPh Pasal 23.

16. Bahwa dari bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, sangat jelas bahwa tidak terdapat transaksi *reimbursement* sebagaimana disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

17. Bahwa selain itu, dalam proses pengambilan keputusan, Majelis juga terikat dengan Asas *Audio Et Alteram partem* yang berarti Majelis harus mempertimbangkan pendapat kedua belah pihak.

Bahwa namun dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena telah mengabaikan fakta yang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terkait bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

18. Bahwa menanggapi alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana tertuang pada halaman 20 putusan *a quo* yang menyatakan:

Bahwa selain itu di dalam SE-53/PJ/2009 juga ditegaskan bahwa reimbursement cost bukan merupakan objek Pajak Penghasilan selama dapat didukung oleh bukti-bukti pendukung seperti faktur tagihan, kontrak kerja atau pembayaran gaji;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa ketentuan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak relevan untuk digunakan



sebagai dasar hukum terjadinya sengketa, mengingat ketentuan tersebut baru berlaku pada tanggal 29 Mei 2009.

Bahwa namun demikian, apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetap menggunakan ketentuan SE-53/PJ/2009 sebagai alasan sanggahannya, seharusnya Majelis dapat mempertimbangkan apa yang dinyatakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk memutus sengketa. Karena sebagaimana dinyatakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri, *reimbursement cost* bukan merupakan objek Pajak Penghasilan selama dapat didukung oleh bukti-bukti pendukung seperti faktur tagihan, kontrak kerja atau pembayaran gaji, maka apabila fakta-fakta sampai dengan persidangan tidak ada bukti-bukti pendukung yang dapat membuktikan tentang *reimbursement cost*, Majelis seharusnya tetap mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa putusan Majelis untuk mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait koreksi objek PPh Pasal 23 berupa transaksi *reimbursement* dengan CNOOC sebesar Rp898.225.134,00 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.
20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.49313/PP/M.III/12/2013 tanggal 12 Desember 2013 harus dibatalkan.
- B. Atas Koreksi *Reimbursement* dengan Safari Megah sebesar Rp2.932.800,00



1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 23:

Bhwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan Majelis berpendapat, atas biaya sebesar Rp.2.932.800,00 tersebut nyata-nyata merupakan reimbursement yang terkait dengan biaya yang terlebih dahulu dibayarkan oleh Safari Megah atas pembayaran tol dan parkir dari kendaraan yang Pemohon Banding sewa;

bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 23 berupa pembayaran kepada Safari Megah sebesar Rp. 2.932.800,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas objek PPh Pasal 23 berupa transaksi *reimbursement* dengan Safari Megah sebesar Rp2.932.800,00.
3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan pada intinya transaksi yang dikoreksi merupakan transaksi *reimbursement*.
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut guna menyakini bahwa atas pengeluaran/biaya dimaksud bukan merupakan objek dan tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 23, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyampaikan dokumen yang memadai.
5. Bahwa dengan demikian yang menjadi pokok sengketa sampai dengan proses banding adalah menyangkut pembuktian apakah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan Objek PPh Pasal 23 yang belum dipotong oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
6. Bahwa bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat uji bukti berupa rekam biaya dan bukti pembayaran.



7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi dengan Safari Megah sebesar Rp2.932.800,00 menyampaikan bahwa terkait transaksi dengan PT. Safari Megah sebesar Rp2.932.800,00 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menyampaikan data/dokumen berupa invoice/tagihan dari PT. Safari Megah. Dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan kontrak terkait penyerahan dan pemanfaatan jasa antara kedua belah pihak.

Bahwa atas dasar uraian tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pembayaran sebesar Rp2.932.800,00 adalah terkait dan bagian dari sewa yang merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang belum dipotong dan dilaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

8. Bahwa sesuai dengan pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa sesuai data yang diperoleh pada proses keberatan, pembayaran sebesar Rp2.932.800,00 merupakan bagian dari sewa kendaraan dari PT. Safari Megah, sehingga sesuai dengan Pasal 2 huruf a KEP-170, transaksi tersebut terutang PPh Pasal 23.
9. Bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bahwa atas objek yang terutang PPh Pasal 23 tersebut telah dipotong pajaknya. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetap menyanggah bahwa transaksi yang dikoreksi tersebut merupakan *reimbursement* atas tagihan yang telah dibayarkan lebih dahulu oleh PT Safari Megah.
10. Bahwa Majelis dalam pertimbangannya sebagaimana tertuang pada halaman 23 putusan *a quo* menyatakan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan Majelis berpendapat, atas biaya sebesar Rp2.932.800,00 tersebut nyata-nyata merupakan reimbursement yang terkait dengan biaya yang terlebih dahulu dibayarkan oleh Safari Megah atas pembayaran tol dan parkir dari kendaraan yang Pemohon Banding sewa;



Bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 23 berupa pembayaran kepada Safari Megah sebesar Rp. 2.932.800,00 tidak dapat dipertahankan;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan putusan Majelis tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

10.1. Bahwa berdasarkan data dan fakta sampai dengan proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyampaikan data/dokumen yang memadai terkait pokok sengketa sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).

Bahwa hal ini dapat disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik terkait peminjaman bukti-bukti maupun dokumen sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (3) UU KUP yang menyatakan kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa antara lain adalah memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

10.2. Bahwa dalam proses pengambilan keputusan di persidangan, Majelis harus memperhatikan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

Bahwa menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), ketentuan tersebut mengamatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menentukan beban pembuktian, melakukan penilaian pembuktian dan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan.

Bahwa faktanya, dalam pengambilan putusan atas sengketa *a quo*, Majelis tidak cermat dalam melihat bukti-bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di persidangan.

10.3. Bahwa dengan disampaikannya rekap biaya dan bukti pembayaran, terdapat biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Banding) yang dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Maka sesuai dengan prinsip umum *deductible-taxable*, apabila suatu biaya telah dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 UU PPh, biaya itu merupakan objek pajak bagi pihak penerima penghasilan, dalam hal ini adalah objek PPh Pasal 23.

10.4. Bahwa dari bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, sangat jelas bahwa tidak terdapat transaksi *reimbursement* sebagaimana disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

11. Bahwa menanggapi alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana tertuang pada halaman 22 putusan *a quo* yang menyatakan:

Bahwa selain itu di dalam SE-53/PJ/2009 juga ditegaskan bahwa reimbursement cost bukan merupakan objek Pajak Penghasilan selama dapat didukung oleh bukti-bukti pendukung seperti faktur tagihan, kontrak kerja atau pembayaran gaji;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa ketentuan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar hukum terjadinya sengketa, mengingat ketentuan tersebut baru berlaku pada tanggal 29 Mei 2009.

Bahwa namun demikian, apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menggunakan ketentuan SE-53/PJ/2009 sebagai alasan sanggahannya, seharusnya Majelis dapat mempertimbangkan apa yang dinyatakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk memutus sengketa. Karena sebagaimana dinyatakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri, *reimbursement cost* bukan merupakan objek Pajak Penghasilan selama dapat didukung oleh bukti-bukti pendukung seperti faktur tagihan, kontrak kerja atau pembayaran gaji, maka apabila fakta-fakta sampai dengan persidangan tidak ada bukti-bukti pendukung yang dapat membuktikan tentang *reimbursement cost*, Majelis seharusnya tetap mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).



Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa putusan Majelis untuk mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.49313/PP/M.III/12/2013 tanggal 12 Desember 2013 harus dibatalkan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.49313/PP/M.III/12/2013 tanggal 12 Desember 2013 harus dibatalkan.

III. Kesimpulan

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.49313/PP/M.III/12/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1268/WPJ.07/2010 tanggal 15 November 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2004 Nomor: 00012/203/04/053/09 tanggal 18 November 2009, atas nama: BUT Kodeco Energy Co., Ltd., NPWP: 01.002.404.0-053.000, beralamat di: Gedung



Bursa Efek Indonesia Menara I Lt.24 Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52, Jakarta Selatan 12190, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2004 harus dihitung kembali menjadi sebagaimana perhitungan tersebut di atas adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak sudah benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 23 berupa pembayaran kepada Safari Megah sebesar Rp2.932.800,00 tidak dapat dipertahankan, karena atas biaya sebesar Rp2.932.800,00 tersebut merupakan *reimbursement* yang terkait dengan biaya yang terlebih dahulu dibayarkan oleh Safari Megah atas pembayaran tol dan parkir dari kendaraan yang Pemohon Banding sewa;
- Bahwa koreksi Terbanding atas transaksi jasa pelayaran luar negeri sebesar Rp2.556.922.071,00 tetap dipertahankan, karena diklasifikasikan sebagai sewa aktiva dan terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 sudah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- Bahwa koreksi Terbanding atas transaksi jasa konstruksi sebesar Rp1.134.082.608,00 tetap dipertahankan, karena diklasifikasikan sebagai jasa konstruksi dan terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 sudah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- Bahwa koreksi Terbanding atas sewa kendaraan sebesar Rp40.400.000,00 tidak dapat dipertahankan, karena atas transaksi dengan Duta Harapan sebesar Rp40.400.000,00 merupakan jasa angkutan kendaraan perusahaan angkutan barang yang mengangkut barang dari tempat pengiriman ke tempat tujuan berdasarkan kontrak/perjanjian angkutan yang dibayar berdasarkan banyak/volume barang, berat barang, jarak ke tempat tujuan sepanjang kontrak/perjanjian tersebut semata-mata demi terjaminnya barang yang diangkut tersebut sampai di tempat tujuan pada waktunya, sehingga atas transaksi dimaksud tidak merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa koreksi Terbanding atas jasa konsultan sebesar Rp349.202.687,00 tetap dipertahankan, karena atas jasa konsultan sebesar Rp349.202.687,00 bukan merupakan transaksi piutang *intercompany* dari Pemohon Banding kepada BUT Korea Development Co., Ltd sehubungan dengan jasa konsultan hukum yang diterima BUT Korea Development Co., Ltd dari SSEK, karena tidak didukung oleh dokumen jasa konsultan;
- Bahwa koreksi Terbanding atas transaksi jasa teknik yang telah dibalik/*reverse* sebesar Rp.97.363.906,00 tetap dipertahankan, karena atas transaksi-transaksi yang telah dibalik/*reverse* dengan jumlah sebesar Rp.97.363.906,00 tidak dapat diyakini merupakan jurnal balik/*reversal* yang dilakukan oleh Pemohon Banding, karena Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen pendukung;
- Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung pada hari Selasa, tanggal 21 November 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/. Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

Panitera Pengganti,
ttd/. Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya :

| | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | <u>Rp 2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001